



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

nanganbiru

08
POVERTY GROWS

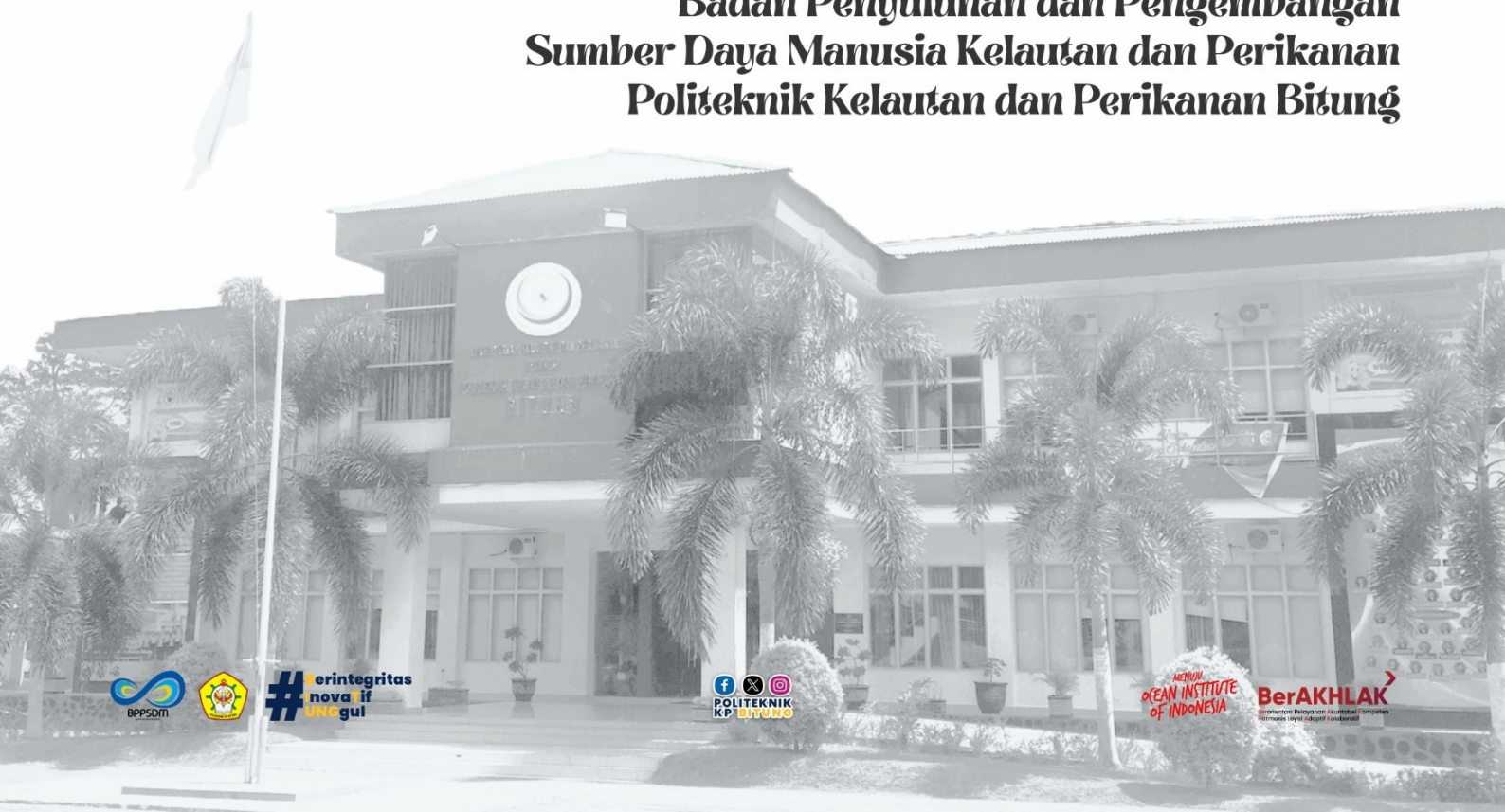
EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

LAPORAN KEGIATAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK (PPID) TRIWULAN I

2026

**Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung**



#Berintegritas
nova if
unggul



MENJADI
OCEAN INSTITUTE
OF INDONESIA

BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Hasil Monitoring Layanan Informasi Publik Triwulan I (Januari–Maret 2026) ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan bagian dari upaya evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Melalui kegiatan monitoring ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai kinerja pelayanan, sekaligus menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan ke depan. Oleh karena itu, hasil monitoring ini tidak hanya berfungsi sebagai laporan administratif, tetapi juga sebagai refleksi bersama untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan monitoring ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada tim pengelola PPID dan unit kerja terkait yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Bitung, April 2026

Ketua Tim Kerja
Tridharma Perguruan Tinggi



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dr. Barokah
NIP. 19751110 200502 1 001

Koordinator Pelaksana PPID,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mohamad Akbar, M.Si
NIP. 19841231 202421 1 007

Mengetahui/Menyetujui
PPID UPT
Direktur,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dr. Rudi Saranga.
NIP. 19730916 200212 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Dasar Pelaksanaan	4
1.4 Ruang Lingkup dan Perode Monitoring	4
BAB II HASIL Monitoring.....	5
3.1 Pelayanan Permohonan Informasi	5
3.2 Ketersediaan Informasi Publik	5
3.3 Pengelolaan Media Informasi	5
3.4 Pengelolaan Pengaduan	6
BAB III PEMBAHASAN HASIL MONITORING	7
3.1 Pelayanan Permohonan Informasi	7
3.2 Ketersediaan Informasi Publik	8
3.3 Pengelolaan Media Informasi	8
3.5 Rekomendasi Tindak Lanjut	9
3.6 Penutup Rencana Tindak Lanjut	11
3.7 Rekomendasi.....	11
BAB IV PENUTUP	12
4.1 Kesimpulan.....	12
4.2 Saran	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Masyarakat tidak lagi sekadar menjadi objek layanan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengetahui, mengakses, dan memanfaatkan informasi yang dikelola oleh badan publik.

Dalam kondisi tersebut, layanan informasi publik memegang peran strategis sebagai jembatan antara institusi dan masyarakat. Kualitas layanan informasi tidak hanya diukur dari kecepatan respon, tetapi juga dari kemudahan akses, kejelasan prosedur, serta ketersediaan informasi yang relevan dan mutakhir.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pengelola layanan informasi publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang profesional dan responsif. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti pengelolaan data yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan monitoring secara berkala untuk melihat sejauh mana layanan informasi publik telah berjalan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan.

Monitoring Layanan Informasi Publik Triwulan I ini merupakan bagian dari upaya evaluasi internal yang dilakukan pada periode Januari hingga Maret 2026, guna memastikan bahwa layanan yang diberikan telah sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Mengetahui capaian kinerja layanan informasi publik Triwulan I
2. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan layanan
3. Menilai efektivitas pengelolaan informasi oleh PPID
4. Menyusun rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan

1.3 Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan Monitoring Layanan Informasi Publik Triwulan I (TW I) Tahun 2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur hak setiap orang untuk memperoleh informasi serta kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi secara transparan dan akuntabel.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang mengatur teknis pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan layanan informasi publik oleh badan publik.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam memberikan layanan informasi publik secara transparan dan akuntabel.
5. Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor: B.277/POLTEK.BTG/OT.210/II/2026 tentang Struktur Organisasi Dan Personalia Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bitung Tahun 2026
6. Rencana Kerja dan Program PPID Tahun 2026, sebagai acuan pelaksanaan monev layanan informasi publik secara berkala.

1.4 Ruang Lingkup dan Periode Monitoring

A. Ruang Lingkup Monitoring meliputi:

- Pelayanan permohonan informasi publik
- Ketersediaan informasi publik
- Pengelolaan media informasi (website/PPID)
- Pengelolaan pengaduan masyarakat

B. Periode monitoring: Januari – Maret 2026 (Triwulan I)

BAB II

HASIL Monitoring

Pada Triwulan II Tahun 2025, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung menetapkan sejumlah target kegiatan yang diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi. Target ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berjalan optimal, khususnya di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi ilmiah

3.1 Pelayanan Permohonan Informasi

- Jumlah permohonan: 5
- Dipenuhi: 5
- Ditolak: 0
- Rata-rata waktu layanan: 3 – 5 hari kerja

Temuan:

Seluruh permohonan informasi telah terpenuhi (100%) tanpa penolakan, dengan waktu pelayanan 3–5 hari kerja yang masih sesuai standar. Namun, jumlah permohonan yang relatif sedikit menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan informasi publik masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi.

3.2 Ketersediaan Informasi Publik

- Informasi berkala: Tersedia / Perlu pembaruan
- Informasi serta-merta: Tersedia / Perlu pembaruan
- Informasi setiap saat: Tersedia / Perlu pembaruan

Temuan:

Informasi publik (berkala, serta-merta, dan setiap saat) telah tersedia, namun masih memerlukan pembaruan agar tetap relevan dan akurat. Pengelolaan informasi belum sepenuhnya optimal dalam hal pemutakhiran data.

3.3 Pengelolaan Media Informasi

- Website PPID: Aktif / Perlu optimalisasi
- Update informasi: Berkala / Belum rutin

Temuan:

Website PPID sudah aktif, namun masih perlu optimalisasi terutama dalam pembaruan konten yang belum rutin. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas website sebagai media utama layanan informasi.

3.4 Pengelolaan Pengaduan

- Jumlah pengaduan: 0
- Tindak lanjut: 0

Temuan:

Tidak terdapat pengaduan selama periode monitoring. Kondisi ini dapat menunjukkan layanan berjalan baik, namun juga mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi kanal pengaduan agar lebih dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat

BAB III

PEMBAHASAN

Hasil monitoring layanan informasi publik pada Triwulan I Tahun 2026 memberikan gambaran umum mengenai kinerja layanan yang telah dilaksanakan oleh PPID. Secara umum, layanan telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses informasi.

Namun demikian, hasil monitoring ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan, terutama dalam hal peningkatan pemanfaatan layanan, konsistensi pembaruan informasi, serta optimalisasi media layanan yang tersedia. Selain itu, penting juga untuk terus mendorong keterlibatan masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan layanan informasi dan kanal pengaduan yang telah disediakan.

Uraian berikut menyajikan hasil monitoring pada masing-masing aspek layanan informasi publik beserta temuan yang diperoleh sebagai dasar untuk perbaikan ke depan.

3.1 Pelayanan Permohonan Informasi

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah permohonan informasi publik pada Triwulan I tercatat sebanyak 5 permohonan dan seluruhnya telah dipenuhi (100%), tanpa adanya penolakan. Hal ini menunjukkan bahwa secara prinsip, layanan informasi publik telah berjalan dengan baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rata-rata waktu pelayanan berada pada rentang 3–5 hari kerja, yang masih berada dalam batas waktu pelayanan yang wajar sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan adanya upaya dari pengelola layanan untuk memberikan respon yang tepat waktu.

Namun demikian, jika dilihat dari jumlah permohonan yang relatif sedikit, terdapat kemungkinan bahwa tingkat pemanfaatan layanan informasi publik oleh masyarakat masih belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, keterbatasan akses informasi, atau rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak memperoleh informasi.

Temuan:

- Seluruh permohonan informasi telah dilayani dengan baik (100% terpenuhi)
- Waktu pelayanan relatif sesuai standar
- Tingkat permohonan masih rendah, sehingga perlu peningkatan sosialisasi layanan

3.2 Ketersediaan Informasi Publik

Ketersediaan informasi publik yang meliputi informasi berkala, serta-merta, dan setiap saat pada dasarnya telah tersedia. Namun demikian, masih diperlukan pembaruan (update) agar informasi yang disajikan tetap relevan, akurat, dan sesuai dengan kondisi terkini.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan informasi publik sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam hal pemutakhiran data. Informasi yang tidak diperbarui secara berkala berpotensi menurunkan kualitas layanan serta kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disediakan.

Temuan:

- Seluruh jenis informasi publik sudah tersedia
- Pembaruan informasi belum dilakukan secara konsisten
- Perlu sistem pengelolaan informasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan

3.3 Pengelolaan Media Informasi

Media layanan informasi berupa website PPID sudah dalam kondisi aktif, yang menunjukkan bahwa sarana layanan informasi secara daring telah tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat.

Namun, pengelolaan website masih memerlukan optimalisasi, khususnya dalam hal pembaruan konten yang belum dilakukan secara rutin. Informasi yang tidak diperbarui secara berkala dapat mengurangi efektivitas website sebagai sumber utama informasi publik.

Selain itu, optimalisasi juga diperlukan pada aspek tampilan, kelengkapan menu, dan kemudahan akses, sehingga website benar-benar dapat berfungsi sebagai media layanan informasi yang informatif dan *user-friendly*.

Temuan:

- Website PPID sudah tersedia dan aktif
- Pembaruan konten belum dilakukan secara rutin

3.4 Pengelolaan Pengaduan

Pada Triwulan I, tidak terdapat pengaduan yang masuk terkait layanan informasi publik. Hal ini dapat diartikan dari dua sudut pandang. Di satu sisi, kondisi ini dapat menunjukkan bahwa layanan informasi publik telah berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat. Namun di sisi lain, juga dapat mengindikasikan bahwa kanal pengaduan belum dimanfaatkan secara optimal atau belum cukup dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa mekanisme pengaduan tersedia, mudah diakses, dan tersosialisasikan dengan baik, sehingga masyarakat dapat menyampaikan masukan atau keluhan apabila diperlukan.

Temuan:

- Tidak terdapat pengaduan selama periode monitoring
- Perlu memastikan kanal pengaduan tersedia dan mudah diakses
- Perlu peningkatan sosialisasi mekanisme pengaduan kepada masyarakat

3.5 Rekomendasi Tindak Lanjut

A. Pelayanan Permohonan Informasi

Untuk meningkatkan pemanfaatan layanan informasi publik oleh masyarakat, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi layanan informasi publik secara lebih masif melalui media sosial, website, dan media komunikasi lainnya.
2. Menyediakan panduan layanan informasi publik yang mudah dipahami oleh masyarakat.
3. Meningkatkan kemudahan akses layanan, baik secara daring maupun luring.
4. Mempertahankan dan meningkatkan ketepatan waktu pelayanan agar tetap sesuai standar.

B. Ketersediaan Informasi Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi informasi publik, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:

1. Melakukan pembaruan (update) informasi secara berkala sesuai dengan perkembangan data terbaru.
2. Menyusun dan mengelola Daftar Informasi Publik (DIP) secara lebih sistematis.
3. Menetapkan jadwal rutin pemutakhiran informasi pada setiap unit kerja.
4. Meningkatkan koordinasi antar unit untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data.

C. Pengelolaan Media Informasi

Untuk mengoptimalkan fungsi website PPID sebagai media utama layanan informasi publik, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pembaruan konten website secara rutin dan terjadwal.
2. Melengkapi menu dan fitur website agar lebih informatif dan mudah diakses.
3. Meningkatkan kualitas tampilan dan navigasi website agar lebih user-friendly.
4. Menugaskan petugas khusus untuk pengelolaan dan pemeliharaan website PPID.

D. Pengelolaan Pengaduan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:

1. Mensosialisasikan kanal pengaduan layanan informasi publik kepada masyarakat.
2. Menyediakan media pengaduan yang mudah diakses (website, email, atau media lainnya).
3. Menyusun dan menerapkan prosedur penanganan pengaduan yang jelas dan terdokumentasi.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pengelolaan pengaduan.

3.6 Penutup Rencana Tindak Lanjut

Pelaksanaan rencana tindak lanjut ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik secara menyeluruh, baik dari sisi aksesibilitas, kecepatan layanan, maupun keterbukaan informasi. Dengan adanya upaya perbaikan yang berkelanjutan, layanan informasi publik diharapkan semakin responsif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

3.7 Rekomendasi

Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, disarankan:

1. Meningkatkan ketepatan waktu dalam pelayanan informasi
2. Melakukan pembaruan website secara rutin
3. Melengkapi dan mengklasifikasikan informasi publik
4. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola PPID
5. Mengembangkan sistem dokumentasi layanan yang lebih baik

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil monitoring layanan informasi publik Triwulan I Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya seluruh permohonan informasi (100%) tanpa adanya penolakan serta waktu pelayanan yang masih berada dalam standar yang ditetapkan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, antara lain rendahnya jumlah permohonan informasi yang mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan layanan oleh masyarakat, belum konsistennya pembaruan informasi publik, serta pengelolaan media informasi yang masih perlu dioptimalkan. Selain itu, tidak adanya pengaduan yang masuk juga perlu dicermati sebagai indikasi perlunya peningkatan sosialisasi kanal pengaduan.

Secara keseluruhan, layanan informasi publik telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai kualitas layanan yang lebih optimal.

4.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik ke depan, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi layanan informasi publik kepada masyarakat melalui berbagai media.
2. Melakukan pembaruan informasi secara rutin dan terjadwal agar informasi tetap relevan dan akurat.
3. Mengoptimalkan pengelolaan website PPID sebagai media utama layanan informasi.
4. Menyediakan dan mensosialisasikan kanal pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan layanan informasi publik.

6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

Dengan adanya perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan layanan informasi publik dapat semakin transparan, akuntabel, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

